

Peran Industri Mikro dan Kecil dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kulon

¹Putri Aulia, ²Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si, ³Aan Julia, SE.,M.Si

^{1,2,3}Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹putriaulia2225@yahoo.com, ²ardariah.68@gmail.com,

³mutiah_aan@yahoo.com

Abstract, The processing industry is a sector that contributes encouraging the economy in the city of Bandung considerably. Bandung Kulon is one of the subdistric in Bandung that its majority by micro and small industries. Eventhough the potential is quite alot, Bandung Kulon stoll have problems in poverty. The aim of this research is to find out the state of pauper in Bandung Kulon, and how many poor worker are absorbed by the industries, and to investigate how big the role of the micro and small industries in eliminating poverty. The method of this research used interview, questionnaires and documentation dissemination. The number of respondents are 97 of the pauper population. The measurment used likert scale. The research findings showed the condition of respondents that divided into four classifications, they are : poor, near poor, hadly poor and not poor. There are 25% of 97 repondents who work in micro and small industries. Meanwhile the role of industries in bandung Kulon is less in eliminating poverty, because most of the owner of micro and small industries employed the worker from familiy and their relatives, and also most of pauper do not have skills in industry feild. Thus, the government should give more orientation towards the problems above in the future.

Keyword : Micro and Small Industries, Eliminating Poverty and Likert Scale.

Abstrak, Industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong perekonomian di Kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang sebagian besar daerahnya didominasi oleh industri mikro dan kecil. Meskipun dengan adanya potensi industri mikro dan kecil di Kecamatan Bandung Kulon cukup banyak, tetap saja Kecamatan Bandung Kulon tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi penduduk miskin di Kecamatan Bandung Kulon, berapa banyak tenaga kerja dari penduduk miskin yang terserap oleh industri mikro dan kecil, meneliti seberapa besar peran industri mikro dan kecil dalam mengentaskan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Jumlah responden adalah sebanyak 97 orang dari populasi rumah tangga miskin. Teknik pengukuran data dari kuesioner berupa pertanyaan tertutup menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan kondisi responden terbagi kedalam empat klasifikasi garis kemiskinan yaitu tergolong miskin, hampir miskin, hampir tidak miskin dan tidak miskin. Terdapat sebanyak 25 persen dari 97 responden dapat bekerja pada industri mikro dan kecil. Sedangkan peran industri mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kulon kurang berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan sebagian besar pemilik industri mikro dan kecil menggunakan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat terdekat, selain itu sebagian besar dari penduduk miskin tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk bekerja di industri. Dengan demikian untuk kedepan hal-hal tersebut perlu perhatian dari pemerintah.

Kata Kunci : Industri Mikro dan Kecil, Pengentasan Kemiskinan dan Skala Likert

A. Pendahuluan

Industri pengolahan merupakan sektor terbesar kedua setelah perdagangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2011 industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 24,44 persen terhadap perekonomian Kota Bandung. Namun pada tahun - tahun berikutnya, kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 1,27 persen, pada tahun 2013 mengalami penurunan 1,34 persen, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,85 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,89 persen.

Meskipun kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan, diharapkan

sektor ini di masa depan dapat tetap memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja di Kota Bandung. Berdasarkan data Potensi UKM Kota Bandung tahun 2012, sebagian besar industri pengolahan di Kota Bandung yaitu berupa UMKM sebanyak 99,37 persen, jika dirinci menurut skala usaha terdapat 75,42 persen pada usaha skala mikro dan 19,49 usaha skala kecil. Industri pengolahan ini tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung dan membentuk sentra.

Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh pemukiman penduduk, daerah industri dan kawasan perdagangan. Di Kecamatan Bandung Kulon tersebar beberapa pabrik garment dan tekstil, pengrajin tahu, serta pengrajin boneka. Meskipun dengan adanya potensi industri yang dimiliki Kecamatan Bandung Kulon cukup banyak tetap saja Kecamatan Bandung Kulon tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data Kota Bandung Dalam Angka pada tahun 2013 Kecamatan Bandung Kulon merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ke dua setelah Kecamatan Kiaracondong.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2011 sebesar 10.296 jiwa atau terdapat sebanyak 2.014 rumah tangga miskin. Namun pada tahun 2012 terjadinya peningkatan industri mikro dan kecil tetapi tidak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebesar 8.134 jiwa atau sebanyak 1.826 rumah tangga miskin bersamaan dengan menurunnya jumlah unit usaha kecil di Kecamatan Bandung Kulon.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi penduduk miskin di Kecamatan Bandung Kulon, untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja dari penduduk miskin yang terserap oleh industri mikro dan kecil di Kecamatan Bandung Kulon dan untuk mengetahui dan meneliti seberapa besar peran industri mikro dan kecil dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kulon.

B. Landasan Teori

Industri adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perindustrian). Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakitan atau pembuatan mobil dan pabrik pembuat minuman ringan. Dalam teori ekonomi istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar (Sukirno, 2005 : 194).

Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi secara kongkret upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan penyerapan tenaga kerja.

Disamping itu, IMK memiliki posisi penting dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengurangi kesenjangan (*gap*) pendapatan (BPS, Profil IMK 2014).

Untuk meratakan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan dapat dilakukan dengan mengupayakan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. IMK merupakan peluang dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tujuan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah. Dengan adanya pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini diharapkan dapat meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam pembangunan terutama di negara berkembang. Namun di negara-negara yang lebih kaya cenderung besar memiliki tingkat kemiskinan absolut yang rendah. Melalui berbagai cara seperti ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha serta bantuan dari pemerintah dan LSM yang lebih besar orang-orang yang tinggal di negara kaya cenderung dapat keluar dari kemiskinan (Todaro, 2011 : 290).

Seseorang yang memiliki pengeluaran berada di bawah garis kemiskinan tergolong penduduk atau rumah tangga miskin. Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2016).

Kemiskinan disebabkan pembangunan yang tidak merata, karena sistem pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar.

Menurut Korten (2006) dalam Warsilah (2015), pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan. Ketiga persoalan ini sangat kompleks, sehingga jika suatu negara ingin keluar dari permasalahan eksklusi sosial dan kemiskinan membutuhkan paradigma baru dalam pembangunannya, yakni paradigma yang mengutamakan dimensi sosial budaya dalam proses pembangunan. Konsep baru ini diberi nama pembangunan inklusif.

Dalam pengertiannya Rauniyar dan Kanbur (2009) dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dipahami untuk merujuk pada sebuah pertumbuhan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pembangunan ekonomi inklusif fokus pada kesempatan-kesempatan ekonomi dan aksesnya bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan, kelompok atau tingkatan, tidak hanya bagi kaum miskin. Sebuah pembangunan ekonomi dikatakan inklusif saat semua anggota dari sebuah komunitas berpartisipasi di dalamnya dan berkontribusi yang sama terhadap proses tersebut tanpa melihat kondisi-kondisi atau latar belakang pribadi mereka. Dalam cara yang sama, pembangunan ekonomi inklusif adalah sesuatu yang menekankan bahwa peluang-peluang ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersedia sebanyak mungkin bagi semua, terutama kaum miskin (Tambunan, 2015 : 213).

Ide dari pembangunan ekonomi yang inklusif pertama kali muncul setelah diperkenalkan di dalam tujuan-tujuan pembangunan milenium atau dikenal secara luas dengan sebutan MDGs, yang dimotivasi oleh banyak fakta bahwa banyak negara di dunia yang telah mencapai hasil-hasil yang menakjubkan di dalam pembangunan jangka panjang mereka dalam banyak bentuk, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita yang tinggi, dan perubahan struktur ekonomi yang pesat dari berbasis pertanian ke berbasis industri (Tambunan, 2015 : 215).

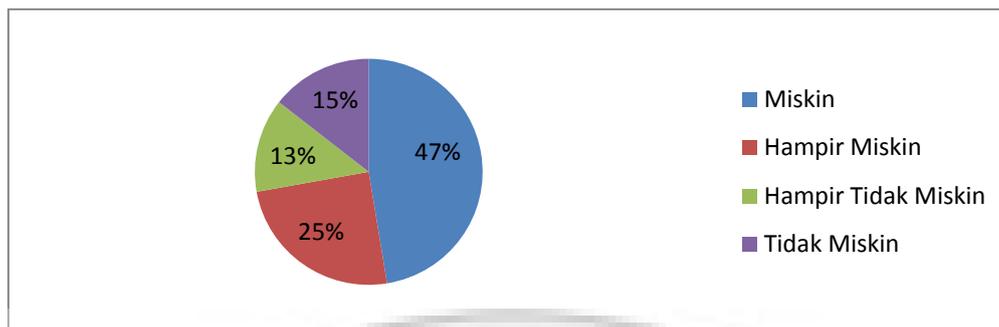
C. Hasil Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, pada pembahasan ini akan dikemukakan mengenai kondisi penduduk miskin di Kecamatan Bandung Kulon, berapa banyak responden atau penduduk miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat bekerja pada industri mikro dan kecil, serta seberapa besar peran industri mikro dan kecil dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif mengenai kondisi penduduk miskin yang ada di Kecamatan Bandung Kulon, serta pembobotan kuisioner yang telah diajukan kepada 97 responden untuk mengetahui seberapa besar peran industri mikro dan kecil dalam mengentaskan kemiskinan.

Analisis Kondisi Penduduk Miskin di Kecamatan Bandung Kulon Interpretasi Garis Kemiskinan

BPS mengklasifikasikan empat kelompok masyarakat berdasarkan garis kemiskinan, yaitu kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, hampir tidak miskin dan tidak miskin. Bila pengeluaran per kapita per bulan dari seorang individu berada di bawah garis kemiskinan, maka ia dikatakan miskin. Bila pengeluarannya pada kisaran 1 hingga 1,2 kali garis kemiskinan, maka ia dikatakan hampir miskin. Penduduk yang memiliki pengeluaran antara 1,2 hingga 1,5 kali garis kemiskinan dikelompokkan pada kategori hampir tidak miskin, sedangkan penduduk dengan tingkat pengeluaran rata-rata per bulan per kapita di atas 1,5 garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk tidak miskin (Prawiradinata, 2012 dalam Maipita, Indra : 2014)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, total garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 332.145 per bulan. Namun jika angka Garis Kemiskinan disesuaikan dengan Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun Mei 2017 terhadap Mei 2016 sebesar 4,14 persen, maka total garis kemiskinan perkotaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar Rp 345.896 per bulan. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan per bulan September 2016 dan hasil dari 4,14 persen diambil dari Garis Kemiskinan per bulan September 2016. Dapat dilihat pada gambar 4.3 Grafik Klasifikasi Penduduk Miskin di Kecamatan Bandung Kulon Berdasarkan Garis Kemiskinan yang telah disesuaikan dengan data inflasi Jawa Barat tahun ke tahun Mei 2017 terhadap Mei 2016 sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Klasifikasi Penduduk Miskin di Kecamatan Bandung Kulon Berdasarkan Garis Kemiskinan yang Telah disesuaikan dengan Data Inflasi Jawa Barat Tahun ke Tahun Mei 2017 terhadap Mei 2016

Berdasarkan data pada gambar 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sebesar 47 persen atau sebanyak 46 orang tergolong miskin, dengan biaya pengeluaran untuk setiap anggota keluarganya berada dibawah garis kemiskinan yaitu kurang dari Rp 345.896 per bulan. Responden yang tergolong hampir miskin sebesar 25 persen atau sebanyak 24 orang, penduduk miskin yang tergolong hampir miskin ini mengeluarkan biaya pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan setiap anggota keluarganya pada kisaran 1 hingga 1,2 kali garis kemiskinan atau lebih besar sedikit berada di atas garis kemiskinan atau pengeluarannya lebih dari Rp 345.896 per bulan dan kurang dari Rp 415.075 per bulan. Responden yang tergolong hampir tidak miskin adalah sebesar 13 persen atau sebanyak 13 orang, responden yang tergolong hampir miskin tersebut memiliki pengeluaran antara 1,2 hingga 1,5 kali garis kemiskinan atau sebesar Rp 415.075 sampai dengan Rp 518.844 per bulan. Ada pula responden yang tergolong tidak miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 15 persen atau sebanyak 14 orang. Rata – rata biaya yang dikeluarkannya untuk menanggung jumlah tanggungan di keluarga adalah lebih dari 1,5 kali garis kemiskinan atau lebih dari Rp 518.844 per bulan.

Analisis Pengeluaran Kebutuhan Pangan dan Non-Pangan

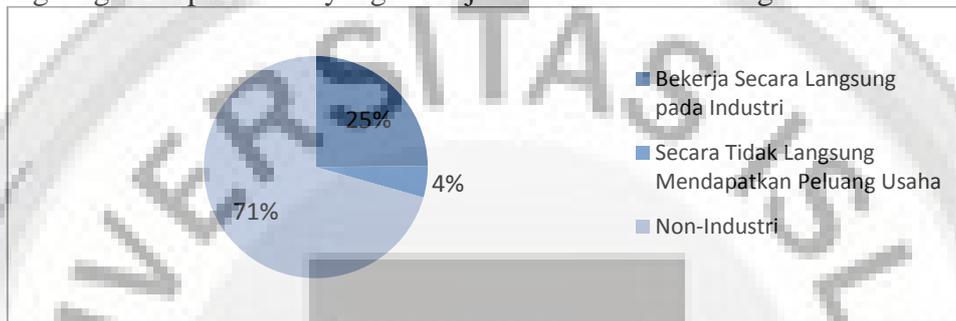
Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salahsatu ukuran dalam indikator kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan pangan ini meliputi pemenuhan kebutuhan makan perharinya dan pemenuhan kebutuhan akan makanan yang bergizi seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan pengukuran pemenuhan kebutuhan non-pangan bagi penduduk miskin meliputi pengeluaran minimal untuk perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan per orang berdasarkan garis kemiskinan yang telah disesuaikan dengan angka inflasi Jawa Barat tahun ke tahun Mei 2017 terhadap Mei 2016 adalah sebesar Rp 243.639 per bulan atau setara dengan pemenuhan kalori 2100 per hari, sedangkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan adalah sebesar Rp 102.257 per bulan.

Dari hasil analisis pengeluaran kebutuhan pangan dan non-pangan dari 97 responden atau penduduk miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahawa pengeluaran non-pangan penduduk miskin lebih kecil daripada pengeluaran kebutuhan pangan. Biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk miskin sebesar Rp 0 – Rp 500.000 per bulan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan sebesar Rp 0 – Rp 182.000 per bulan.

Analisis Penduduk Miskin yang Bekerja di Industri Mikro dan Kecil

Ada berbagai macam industri mikro dan kecil yang diketahui oleh responden di Kecamatan Bandung Kulon yaitu industri pengolahan tahu, tahu cetak, tahu bulat, industri pengolahan tempe, kerupuk, basreng, terasi, konveksi kaos, industri pembuatan boneka, konveksi kerudung, konveksi rajutan, sablon, industri toge, konveksi seragam, konveksi pakaian jadi, konveksi celana jeans, konveksi sarung bantal dan konveksi topi.

Berdasarkan hasil survei terhadap 97 responden di Kecamatan Bandung Kulon dapat diketahui jumlah keseluruhan anggota keluarga dari 97 responden adalah sebanyak 429 orang. Dari jumlah anggota keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang bekerja yaitu sebanyak 153 orang. Dapat dilihat pada gambar 4.4 komposisi penduduk miskin yang terlibat pada industri mikro dan kecil secara langsung maupun tidak langsung serta penduduk yang bekerja di non-industri sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Komposisi Penduduk Miskin yang Terlibat Secara Langsung maupun Tidak Langsung pada Industri Mikro Dan Kecil dan Penduduk yang Bekerja di Non-Industri

Sumber : Hasil Survei 2017

Berdasarkan data pada gambar 2 dapat diketahui bahwa dari 153 jumlah anggota keluarga responden yang bekerja di Kecamatan Bandung Kulon hanya ada sebesar 25 persen atau sebanyak 38 orang yang bekerja secara langsung pada industri mikro dan kecil, sedangkan penduduk yang bekerja secara tidak langsung dengan adanya keberadaan industri tersebut sebesar 4 persen atau sebanyak 7 orang. Dari 153 jumlah anggota keluarga responden tersebut sebagian besar bekerja pada non-industri yaitu sebesar 71 persen atau sebanyak 108 orang.

Analisis Peran Industri Mikro Dan Kecil Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pembobotan kuisioner, tanggapan responden terhadap peran industri mikro dan kecil dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini penulis menyediakan lima butir pernyataan yang telah ditanggapi oleh responden dengan rata-rata persentase capaian sebesar 46,88 persen yang menunjukkan bahwa industri mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kulon kurang berperan dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu :

1. Tanggapan responden terhadap pernyataan dapat bekerja pada industri mikro atau kecil di Kecamatan Bandung Kulon pada persentase capaian sebesar 50,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa industri mikro dan kecil cukup berperan dalam penyerapan tenaga kerja dari penduduk miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Namun sebagian besar responden atau sebanyak 67 orang menyatakan tidak dapat bekerja di industri mikro atau kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kulon hal ini disebabkan sebagian besar pemilik industri mikro dan kecil menggunakan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat terdekat

serta tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk bekerja di industri. Selain itu hal yang menyebabkan responden atau penduduk miskin tidak dapat bekerja di industri disebabkan oleh faktor usia yang sudah tua karena terdapat beberapa responden sebanyak 13 orang yang berusia 65 tahun lebih sehingga mereka tidak dapat produktif untuk bekerja pada industri yang membutuhkan keterampilan dari pekerja.

2. Persentase capaian pada butir pernyataan peluang yang diberikan industri mikro dan kecil di Kecamatan Bandung Kulon sebesar 48,65 persen artinya peluang usaha yang diperoleh responden dari keberadaan industri mikro dan kecil kurang berperan dalam memberikan peluang usaha bagi penduduk miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sebagian besar responden menyatakan tidak bisa memiliki peluang usaha karena tidak memiliki modal yang cukup untuk ikut membuka usaha baru, selain itu sebagian responden menyatakan bahwa yang memiliki peluang usaha dengan keberadaan industri tersebut hanya orang tertentu saja seperti saudara atau kerabat dari pemilik industri.
3. Persentase capaian pada butir pernyataan peningkatan pendapatan dari manfaat yang diperoleh dari keberadaan industri mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kulon sebesar 48,86 persen artinya bahwa dengan manfaat yang diperoleh penduduk miskin atau responden dari keberadaan industri kurang berperan dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena besarnya upah yang diperoleh dari hasil bekerja pada industri mikro dan kecil ditentukan oleh berapa banyak produk yang dapat dihasilkan oleh pekerja di industri. Selain itu rata-rata pekerja pada industri mikro dan kecil merupakan buruh harian lepas yang belum tentu mendapatkan pekerjaan setiap harinya.
4. Persentase pada butir pernyataan peningkatan pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin atau responden sebesar 47,83 persen, artinya industri mikro dan kecil kurang berperan dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan bahwa masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki kesempatan atau peluang untuk memperoleh manfaat dari keberadaan industri mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kulon.
5. Hasil pembobotan dari pernyataan peningkatan kehidupan keluarga menjadi lebih baik dengan manfaat yang diperoleh dari industri mikro dan kecil mencapai 38,18 persen. Industri mikro dan kecil kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal tersebut disebabkan upah yang didapatkan penduduk miskin yang bekerja di industri mikro dan kecil tidak tetap setiap hari atau setiap minggunya dan upah yang diperoleh dari industri mikro dan kecil relatif rendah, dan masih banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan industri tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dapat diketahui kondisi penduduk miskin di Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan hasil analisis klasifikasi garis kemiskinan tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun Mei 2017 terhadap Mei 2016, terdapat 47 persen responden yang tergolong miskin, sebesar 25 persen responden tergolong hampir miskin, sebesar 13 persen responden tergolong hampir tidak miskin dan sebesar 15 persen responden

tergolong tidak miskin. Sedangkan kondisi pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dari segi pengeluaran kebutuhan pangan dan non-pangan dari 97 responden dapat diketahui bahwa pengeluaran non-pangan penduduk miskin lebih kecil daripada pengeluaran kebutuhan pangan. Biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk miskin sebesar Rp 0 – Rp 500.000 per bulan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan sebesar Rp 0 – Rp 182.000 per bulan.

2. Industri mikro dan kecil di Kecamatan Bandung Kulon menjadi salahsatu kesempatan kerja bagi penduduk miskin. Dari 97 responden terdapat sebanyak 25 persen yang bekerja pada industri mikro dan kecil yaitu pada industri tahu cetak, tahu bulat, sablon, konveksi pakaian, konveksi sweater, konveksi topi, konveksi sarung bantal, konveksi kerudung, industri boneka dan industri toge.
3. Industri mikro dan kecil kurang berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kulon. Hal ini terutama disebabkan sebagian besar pemilik industri mikro dan kecil menggunakan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat terdekat. Selain itu sebagian besar dari penduduk miskin tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk bekerja di industri.

Daftar Pustaka

- BPS Kota Bandung. 2015. Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2015.
- BPS Kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon Dalam Angka Tahun 2011 – 2013.
- BPS Kota Bandung. Statistik Daerah Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2016.
Diakses melalui [https://bandungkota.bps.go.id/website/pdfpublikasi/ Statistik-Daerah-Kecamatan-Bandung-Kulon-2016---.pdf](https://bandungkota.bps.go.id/website/pdfpublikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Bandung-Kulon-2016---.pdf) pada tanggal 17 Maret 2017.
- BPS, 2014. Survei Industri Mikro dan Kecil 2014 “Profil Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014”. Jakarta : BPS Jakarta Indonesia
- Maipita, Indra. 2014. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Edisi I, Maret 2014. Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. Mikro Ekonomi teori pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo persada
- Tambunan, Tulus T.H. 2015. Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi. Bogor : Ghalia Indonesia
- Todaro.M.P dan Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi 11. Jakarta : Erlangga
- Warsilah, Henny. 2015. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semangi, Solo, Jawa Tengah. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lipi.